

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Seragam sekolah menjadi salah satu hal yang identikal pada diri seorang pelajar, sebuah setelan busana dengan model, pola, dan warna yang sama guna dipakai di dalam lingkungan sekolah. Keterkaitan antara pelajar dan seragam sekolahnya dipandang sebagai suatu identitas yang membentuk dirinya, baik secara individu maupun kelompok. Heathorn (2000, dikutip dari Karaoulas, 2025), keterkaitan tersebut mengarah pada hubungan pelajar dengan institusi pemerintah, nilai-nilai sosial, serta tujuan pendidikan. Selain penggunaannya yang praktis untuk kegiatan sehari-hari, seragam sekolah juga merepresentasikan identitas pribadi yang penuh disiplin dan tertib. Di Indonesia, seragam sekolah mencerminkan suatu perwujudan guna membentuk karakter pelajar yang disiplin, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta menciptakan kesetaraan di kalangan siswa.

Pakaian seragam sekolah membentuk suatu identitas bagi pelajar yang memakainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas diartikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Dalam sebuah buku yang dikonsetualisasikan Littlejohn, Foss, dan Oetzel (2017), identitas diperkenalkan sebagai suatu konsep umum ketika individu membangun identitasnya saat berinteraksi dengan orang lain atau kelompok. Identitas seseorang merupakan suatu proses dinamis yang terus-menerus mengalami perubahan karena setiap individu akan melakukan konstruksi, rekonstruksi, maupun negosiasi terhadap identitasnya, sehingga identitas bukanlah suatu hal yang kaku, tunggal, maupun bawaan yang diterima secara pasif sejak lahir. Identitas diri menegaskan keunikan seseorang sebagai akibat dari proses interaksi yang ia lakukan dengan menggabungkan unsur-unsur yang ia dapatkan untuk mempertahankan prinsipnya secara konsisten guna mendukung dirinya menduduki posisi stabil di lingkungannya. Identitas diri juga menonjolkan

ciri, sifat, atau watak unik yang membedakan individu dengan individu lainnya di dalam kelompok tertentu (Ayunda, et al., 2025).

Pemakaian seragam sekolah secara modern pertama kali ditemukan dan diterapkan di Christ's Hospital Boarding School, Inggris pada abad ke-17. Siswa-siswa yang mengenyam pendidikan di sana diwajibkan untuk memakai jubah berwarna biru dan stoking kuning sebagai seragam sekolah mereka. Di sisi lain, catatan jurnal Uskup Agung Carterbury mengungkapkan bahwa penggunaan seragam sekolah sudah diberlakukan di Inggris sejak tahun 1222 saat seluruh murid yang berada di bawah naungannya diwajibkan untuk memakai seragam sekolah berupa jubah yang dikenal sebagai *cappa clausa*. Kemudian, penggunaan seragam ini diadaptasi oleh berbagai sekolah-sekolah di Eropa, Amerika, hingga Asia (Sulastri & Husin, 2017; britannica.com).

Penggunaan seragam sekolah pertama kali diperkenalkan di dunia pendidikan Indonesia sekitar tahun 1905 ketika diberlakukannya kebijakan Politik Etis oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Kebijakan pendidikan pada masa Kolonialisme Belanda di Indonesia salah satunya mencakup penggunaan seragam bagi masing-masing pelajar yang mengemban pendidikan di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Namun, Pemerintah Kolonial Belanda menjadikan penggunaan seragam sekolah sebagai kebijakan pendidikan saat itu untuk melegitimasi lahirnya hierarki baru di antara pelajar pribumi dengan pelajar Eropa. Seragam sekolah menjadi penanda untuk membedakan pelajar Eropa dengan pelajar pribumi, juga menunjukkan status sosial seorang pelajar melalui seragam sekolah yang mereka pakai.

Hierarki yang dibentuk pada masa Pemerintah Kolonial Belanda kemudian dihapuskan sepenuhnya pada tahun 1942 ketika Jepang menginvasi Indonesia. Seragam sekolah kembali diberlakukan di seluruh sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Jepang. Mereka berupaya untuk mengubah makna penggunaan seragam sekolah yang dulunya menjadi 'penanda' untuk membedakan kelas dan status sosial para pelajar di masa Kolonialisme Belanda. Seragam sekolah yang

dikenakan oleh pelajar membentuk karakteristik disiplin dan menciptakan kesetaraan di antara siswa-siswa yang belajar di sekolah. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan sosial di lingkungan sosial antarpelajar, tetapi juga menghapus sisa-sisa pengaruh budaya kebarat-baratan yang ditinggalkan oleh Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah yang dipimpin oleh Soekarno belum benar-benar memerhatikan penggunaan seragam sekolah untuk dikemas dalam suatu kebijakan. Namun, pelajar mengadopsi kembali pemakaian seragam sekolah yang pernah berlaku di masa Kolonialisme Jepang. Lubis (2008) menyatakan ketika dirinya duduk di bangku sekolah dasar, belum ada aturan untuk menggunakan pakaian seragam di dalam lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan belum adanya kebijakan maupun keputusan mutlak dari pemerintah mengenai penggunaan seragam di sekolah. Nyatanya, fokus pemerintah saat itu adalah membentuk karakter siswa untuk memiliki jiwa patriotisme tinggi serta bermoral baik untuk ikut berperan dalam masyarakat maupun negara sesuai dengan Pancasila. Di samping itu, pendidikan pada masa Soekarno, terutama pada masa 1950-an, dicondongkan pada tujuan bahwa siswa kelak akan menjadi manusia sosialis seperti yang tertera pada UU no. 12 tahun 1954 (penyempurnaan dari UU no. 4 tahun 1950) tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia. Walau ketentuan seragam sekolah belum diatur sedemikian rupa di bawah kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Soekarno, namun beberapa sekolah swasta sudah menerapkan kebijakan seragam sesuai identitas sekolahnya, maupun mengimbau para siswanya untuk berpakaian rapi dan sopan di dalam lingkungan sekolah.

Selain sekolah swasta yang menetapkan ketentuan berseragam bagi muridnya, sekolah-sekolah negeri juga menetapkan pakaian seragam sekolah bagi para muridnya. Hal ini disebabkan belum adanya kebijakan yang mengatur pakaian seragam sekolah di awal era Orde Baru, sehingga pakaian seragam sekolah saat itu cenderung bervariasi menyesuaikan peraturan sekolah maupun kanwil setempat. Pada tahun 1970-an,

penggunaan seragam sekolah dipengaruhi oleh pengaruh mode Barat, terutama mode *hippies* dan *rock* sebagai bentuk ekspresi diri sekaligus mencirikan identitas pelajar sebagai seorang remaja. Upaya tersebut merupakan bentuk negosiasi identitas yang dilakukan pelajar terhadap ketentuan berseragam yang dihimbau dari sekolah. Stella Ting-Toomey (dalam Littlejohn, et al., 2017) mengungkapkan bahwa negosiasi identitas merupakan upaya yang dilakukan agar seseorang atau kelompok dapat menemukan keamanan, inklusivitas dan keterikatan antar sesama dalam suatu hubungan yang pasti serta berkelanjutan, walau kenyataannya hal tersebut sukar untuk direalisasikan.

Pakaian seragam sekolah menjadi suatu ciri khas yang menonjolkan yang penggunaan seragam sekolah mulai dilakukan secara berangsur-angsur oleh pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) 052/C/Kep/D.82 mengenai Pedoman Pakaian Seragam Sekolah bagi Siswa Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Tingkat Atas. Surat keputusan ini diresmikan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Darji Darmodiharjo, SH. pada tanggal 17 Maret 1982. Penggunaan seragam sekolah dalam skala nasional ini bertujuan untuk menghilangkan perbedaan status seorang pelajar dengan pelajar lain, sekaligus untuk membentuk karakteristik yang disiplin dan bertanggung jawab untuk pelajar di sekolah. Sejalan dengan pemberlakuan SK tersebut, pemerintah juga mengatur penggunaan seragam pramuka melalui Keputusan Kwartir Gerakan Nasional Pramuka No. 055 Tahun 1982 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Pengenal Gerakan Pramuka.

Pemberlakuan SK 052 yang dimulai pada masa Daoed Joesoef menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1978-1983 berangsur-angsur dimasifkan kepada pelajar-pelajar di seluruh negeri dan diperkenalkan kepada masyarakat mengenai seragam sekolah nasional oleh Pemerintah Orde Baru. Seragam yang dulunya menonjolkan ciri khas dan identitas masing-masing sekolah yang beragam perlahan berubah menjadi simbol baru bagi pelajar dengan label-label yang ditetapkan oleh

pemerintah di dalam kebijakan yang sudah diaturnya. Kemudian, SK 052 tahun 1982 dicabut dan ‘disempurnakan’ dengan Surat Keputusan (SK) No. 100/C/Kep/D/1991 dengan memunculkan pakaian seragam khas bagi siswi Muslimah yang bersekolah di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. SK no. 100 tahun 1991 merupakan hasil dari negosiasi panjang antara politikus Muslim dan Pemerintah Orde Baru yang sebelumnya tidak mencantumkan pakaian seragam khas bagi siswi Muslimah secara utuh di sekolah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasca era Orde Baru, pemerintah Reformasi tidak banyak mengubah regulasi pemakaian seragam sekolah. Meski begitu, pemakaian seragam sekolah di masa Orde Baru dengan masa Reformasi menunjukkan suatu perbedaan sebab muncul kecenderungan gaya pakaian melalui penggunaan seragam sekolah yang dimodifikasi oleh peserta didik, misalnya mengecilkan ukuran seragam sekolah atau mengecilkan diameter celana di kalangan pelajar selang tahun 2000-2010an. Kemudian, pemerintah mulai memberlakukan peraturan baru melalui Permendikbud no. 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang diresmikan oleh Mohammad Nuh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Di sisi lain, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka juga mengeluarkan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka sebagai pengganti Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 055 Tahun 1982.

Seragam sekolah menjadi sebuah label dalam membentuk identitas bagi pelajar sesuai dengan yang tertuang pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah guna mengatur cara berpakaian seragam sekolah sebagai penonjolan identitas seorang pelajar. Munculnya kebijakan penggunaan seragam ini menjadi cara pemerintah untuk melahirkan sebuah sistem kehidupan yang tertata untuk meningkatkan Ketahanan Sekolah dalam merealisasikan tujuan pemerintah bahwa sekolah sebagai

Pusat Kebudayaan sesuai yang tertera pada SK 052 Tahun 1982. Berbeda dengan Permendikbud No. 45 Tahun 2014 yang tidak lagi menjadikan sekolah sebagai Pusat Kebudayaan, melainkan peraturan tersebut mencondongkan tujuan terhadap membangun citra satuan pendidikan yang baik dan sehat melalui penggunaan seragam terhadap pelajar di sekolah. Ada perubahan dari tujuan penggunaan seragam sekolah sebagai busana identitas pelajar dari masa ke masa yang nanti akan dikaji lebih lanjut oleh penulis di dalam kepenulisan ini.

Berdasarkan pemikiran yang sudah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai perkembangan penggunaan seragam sekolah sebagai busana identitas pelajar tahun 1970-2014 sebagai topik penelitian yang akan dilakukan penulis nantinya. Berangkat dari artikel ilmiah berjudul “Kapas, Kain, dan Seragam Sekolah di Jawa 1900-1942” yang ditulis oleh Sri Sulastri, Program Studi Pendidikan Sejarah FIPPS, Universitas Indrapasta PGRI serta tesis dengan judul “Pedoman Pakaian Seragam Sekolah Sebuah Politik Pemerintah Orde Baru terhadap Pakaian Seragam 1982-1991” yang ditulis oleh Sri Martini, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Universitas Indonesia memantik keingintahuan penulis untuk meneliti perkembangan penggunaan seragam sekolah serta objektifikasi seragam sekolah yang membentuk ciri khas dari seorang pelajar yang bertanggung jawab, disiplin, dan menjunjung tinggi rasa persatuan serta kesatuan di lingkungan sekolah sebelum nantinya ia berperan di dalam masyarakat maupun negara. Pernyataan yang sudah dijabarkan di atas menunjukkan ada upaya Orde Baru membentuk identitas dan disiplin pelajar melalui kontrol terhadap tubuh dan penampilan dengan pakaian seragam sekolah.

Tak hanya itu, menarik untuk dibahas bahwa kebijakan pakaian seragam sekolah bagi pelajar justru mengundang polemik dari masa ke masa, sehingga hal ini menjadi jelas bahwa pentingnya peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembuatan sampai pemberlakuannya kebijakan tersebut.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Secara spasial (sinkronis), penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai perubahan penggunaan seragam sekolah sebagai busana identitas pelajar, sebelum dan sesudah diberlakukannya pedoman penggunaan seragam sekolah untuk tingkat taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah tingkat atas di Jakarta.

Secara temporal (diakronis), penelitian ini akan membahas bagaimana perubahan penggunaan seragam sekolah sebagai busana identitas pelajar tahun 1970-2014 untuk melihat perbedaan penggunaan seragam sekolah sebelum diberlakukannya kebijakan mengenai seragam pada masa Orde Baru (1967-1998) dan masa Reformasi (1998-2014).

2. Perumusan Masalah

Mengacu pada pemikiran dasar serta pembatasan masalah yang dijabarkan di atas, maka penulis merampungkan perumusan masalah dalam perancangan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana seragam sekolah membentuk busana identitas pelajar di Jakarta pada tahun 1970–1981?
2. Mengapa pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan terhadap seragam sekolah sebagai busana identitas pelajar di Jakarta pada tahun 1982?
3. Bagaimana pelajar menegosiasikan identitasnya melalui seragam sekolah di Jakarta pada periode 1982-2014?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada pembatasan dan perumusan masalah yang sudah dijabarkan penulis di bagan sebelumnya, berikut merupakan penjabaran mengenai tujuan dan kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

a. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses seragam sekolah membentuk busana identitas pelajar di Jakarta pada tahun 1970–1981.

2. Mengetahui alasan pemerintah untuk menetapkan kebijakan pedoman penggunaan seragam sekolah sebagai busana identitas pelajar pada tahun 1982.
3. Mengetahui upaya pelajar dalam menegosiasikan identitasnya melalui seragam sekolah di Jakarta pada periode 1982-2014.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembaca dalam mengkaji Sejarah Pendidikan di Indonesia sekaligus menambah literatur terhadap kajian Sejarah Masa Orde Baru dan Sejarah Kontemporer Indonesia.
2. Kegunaan praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain dalam mengkaji lebih dalam mengenai topik yang berhubungan dengan sejarah pendidikan serta referensi bagi mahasiswa di dalam lingkup prodi pendidikan sejarah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menulis penelitian ini adalah metode sejarah menurut Louis Gottschalk. Menurutnya, metode sejarah dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan sejarawan dalam mengkaji jejak-jejak masa lalu dengan kritis yang nantinya dihasilkan melalui suatu penulisan sejarah yang komprehensif. Adapun metode tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.

a. Heuristik

Kegiatan heuristik merupakan kegiatan menemukan dan menelusuri objek sejarah sesuai konteks zaman tertentu, baik dalam bentuk cetak, tertulis, maupun lisan berkaitan dengan objek sejarah yang diteliti. Pada proses ini, penulis telah menemukan, mengumpulkan, dan menelusuri data yang berkaitan dengan topik penelitian penulis, yaitu perubahan seragam sekolah sebagai busana identitas pelajar tahun 1970-2014 dengan menggunakan media surat kabar, majalah, buku, artikel ilmiah, skripsi, maupun data lain yang relevan dengan topik yang akan diteliti.

b. Verifikasi

Kegiatan verifikasi merupakan kegiatan memilah data sejarah. Memilah memiliki arti data-data yang digunakan harus kredibel dan relevan dengan objek atau topik yang tengah diteliti, sehingga kegiatan pemilahan data diperlukan guna menyingkirkan data yang tidak orisinil, kredibel, maupun tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam hal ini, ada dua tahap yang dilakukan oleh penulis dalam memilah data-data yang diperoleh akan dijabarkan di bawah berikut.

1. Kritik Internal

Kritik internal merupakan langkah yang dilakukan oleh sejarawan dalam memastikan keabsahan isi dari suatu sumber yang telah didapatkan. Memastikan keabsahan atau keaslian dari isi sumber tertentu menjadi suatu hal yang cukup krusial bagi sejarawan dalam menulis kembali peristiwa yang terjadi di masa lalu agar penulisannya dapat dipertanggungjawabkan dan melalui tahapan kritis, sehingga penulisan tersebut valid dan sesuai dengan fakta sejarah yang ditemukan.

2. Kritik Eksternal

Kritik eksternal merupakan langkah yang dilakukan oleh sejarawan dalam memastikan keabsahan suatu dokumen sesuai dengan zaman tertentu. Keabsahan tersebut diamati berdasarkan ciri-ciri fisik yang dapat dilihat dari suatu zaman yang diteliti.

c. Interpretasi

Kegiatan interpretasi merupakan kegiatan membuat kesimpulan terhadap data yang sudah dipilah berdasarkan validasi dan kredibilitas secara kritis oleh sejarawan sebagai suatu kerangka yang nantinya akan disusun menjadi sebuah penulisan sejarah. Setelah melakukan langkah-langkah heuristik dan verifikasi seperti

yang sudah dijabarkan di atas, penulis akan kembali mengkaji keseluruhan sumber guna menyusun kesimpulan dari data dan fakta sejarah yang penulis temukan serta hasil penelusuran dari penelitian terhadap perubahan seragam sekolah sebagai simbol identitas busana pelajar, hubungannya dengan relasi kuasa oleh pemerintah, serta negosiasi identitas pelajar terhadap kebijakan seragam pada tahun 1970-2014.

d. **Historiografi**

Kegiatan historiografi merupakan kegiatan menyusun hasil kesimpulan guna menjadi suatu penulisan sejarah berdasarkan penemuan, penelusuran, pemilahan, dan penyimpulan yang sudah dilakukan oleh seorang sejarawan dalam tahap-tahap sebelumnya. Dari seluruh tahapan yang sudah dijabarkan oleh penulis sebelumnya, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah penulisan sejarah yang membahas mengenai Perubahan Seragam Sekolah sebagai Busana Identitas Pelajar Tahun 1970-2014.

E. Sumber Penelitian

1. Sumber Primer

Dalam menulis penelitian ini, penulis akan menggunakan SK no. 052 tahun 1982 sampai Permendikbud no. 45 tahun 2014, serta pedoman terkait penggunaan seragam sekolah dan pramuka. Tidak menutup kemungkinan penulis akan menelusuri sumber lain terkait dengan perubahan seragam sekolah negeri sebagai busana identitas pelajar tahun 1970-2014, seperti dokumentasi berupa foto dan majalah sezaman yang relevan guna melihat perspektif lain dalam proses pengerjaan penelitian.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang akan penulis pakai mencakup penelitian terdahulu dan buku, seperti buku yang ditulis oleh Daniel Dhakidae dengan judul “Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru”. Selain itu, penulis juga akan menggunakan artikel ilmiah berjudul “Kapas, Kain, dan Seragam Sekolah di Jawa 1900-1942” yang ditulis oleh Sri Sulastri, Program Studi Pendidikan Sejarah FIPPS, Universitas Indrapasta

PGRI dan tesis dengan judul “Pedoman Pakaian Seragam Sekolah Sebuah Politik Pemerintah Orde Baru terhadap Pakaian Seragam 1982-1991” yang ditulis oleh Sri Martini, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Universitas Indonesia sebagai acuan penulis dalam meneliti penelitian terkait perkembangan penggunaan seragam sekolah sebagai busana identitas pelajar tahun 1970-2014.

Penulis akan menelusuri sumber-sumber yang berasal dari media cetak, artikel, jurnal, serta buku-buku berkaitan dengan perkembangan penggunaan seragam sekolah negeri sebagai busana identitas pelajar tahun 1970-2014. Hal-hal lain yang membahas mengenai topik penelitian dapat penulis jadikan pendukung guna memperkuat argumentasi yang disampaikan usai melewati tahap verifikasi agar kredibilitasnya dapat dipercaya dan valid.

